

**Kebijakan Australia dalam Penanganan Pencari Suaka Melalui *Operation Sovereign Borders* Era Tony Abbott (Tahun 2013 – 2015)**

**Arsha Rahmadhani**

**1610412068**

**ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari kontradiksi komitmen Australia sebagai negara peratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951 dengan kebijakan pencari suaka di bawah pemerintahan Tony Abbott, yaitu *Operation Sovereign Borders*. Pada tahun 2013, pemerintahan liberal koalisi Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Tony Abbott mengumumkan akan memberlakukan kebijakan *turn back the boats* sebagai elemen kunci dari kebijakan *Operation Sovereign Borders*. *Operation Sovereign Borders* yang mulai berlaku pada 18 September 2013 sejatinya merupakan operasi militer dengan pendekatan sekuritisasi untuk mencegah dan mengembalikan perahu pencari suaka yang berusaha mengakses suaka di Australia. penelitian ini kemudian berupaya menganalisis upaya sekuritisasi yang dilakukan pemerintahan Abbott, dalam prosesnya, sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Abbott melibatkan media massa guna membentuk opini dan memperoleh dukungan publik. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori sekuritisasi, kedaulatan, dan konsep migrasi ilegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya *framing* dan politisasi fenomena pencari suaka sebagai ancaman bagi kedaulatan Australia sehingga dalam penanganannya diperlukan kebijakan luar biasa yang merupakan legitimasi atas penggunaan militer terhadap pencari suaka.

**Kata Kunci:** Pencari Suaka, Australia, *Operation Sovereign Borders*, Sekuritisasi, Migrasi Ilegal

## ABSTRACT

This study departs from the contradiction of Australia's commitment as a ratifying country to the 1951 Refugee Status Related Convention with the asylum seeker policy under Tony Abbott's administration, namely Operation Sovereign Borders. In 2013, the liberal coalition government of Australia under the leadership of Prime Minister Tony Abbott announced it would impose a turn back the boats policy as a key element of Operation Sovereign Borders policy. Operation Sovereign Borders, which came into force on 18 September 2013, is actually a military operation with a securitization approach to prevent and restore asylum seekers seeking access to asylum in Australia. This research then attempts to analyze the securitization efforts made by the Abbott government, in the process, the securitization undertaken by the Abbott government involves the mass media to form opinions and gain public support. In analyzing, the author uses qualitative methods with the theory of securitization, sovereignty, and the concept of illegal migration. The results of this study indicate the existence of framing and politicization of the phenomenon of asylum seekers as a threat to Australia's sovereignty, so that in handling this it requires an extraordinary policy which is the legitimacy of the use of the military against asylum seekers.

**Keywords:** Asylum Seekers, Australia, Operation Sovereign Borders, Securitization, Illegal Migration